



## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Makaria Chambuk

Universitas Musamus, Indonesia

\*Korespondensi : mchambuk12@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ( Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Merauke ). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Responden adalah 50 Pegawai di kantor (BPKAD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah secara parsial kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah, tidak memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Kata kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah.

**Abstract:** This study aims to determine, the Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Internal Control System, Local Financial Supervision, on the Information Value of Local Government Financial Statements, (Case Study on Merauke Regency Government). This type of research is quantitative research. The data used in this study are primary data. Respondents were 50 employees in the office (BPKAD), Merauke Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Data collection methods using questionnaires. The data analysis method used in this research is multiple linear regression. The results of this study are partially the quality of human resources, the utilization of information technology has no influence on the value of financial reporting information, internal control, and regional financial supervision, has no influence on the value of financial reporting information.

**Keywords:** Quality of Human Resources, Information Technology Utilization, Internal Control, Regional Financial Supervision.

## 1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Hengki, 2014 dalam Mardiasmo, 2011). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016).

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2018, dinyatakan bahwa terhadap 348 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Disamping itu, perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi.

Selain kualitas LKPD yang belum maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II tahun 2019, ada 11 dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, 6 diantaranya terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu,

sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Adapun LKPD yang terlambat berjumlah 191 dari total 469 pemerintah daerah. Dengan demikian, hanya 275 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai informasi terkait pentingnya laporan keuangan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Merauke)

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntabilitas (*accountability*)**

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*. Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) me-review informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif ( Andriani, Wiwik (2011).

### **2.2 Transparansi (*transparency*)**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

### **2.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan

yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian ini.

#### **2.4 Nilai Informasi**

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016).

#### **2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Sumaningrum, Tantriani, 2012). Menurut Yudianto (2011), Edy Suparman, (2010) mendefinisikan bahwa "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Karmila, Abries, Rusli, Tanjung, dan Edfan Darlis, 2010).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan.

#### **2.6 Teknologi Informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Kadek Sinarwati, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi,

sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2012 dalam Winidyaningrum, 2010).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan.

## **2.7 Keandalan (*Reliability*) dan Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

## **2.8 Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.9 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Fadilah Mailani (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan *seefektif* dan *seefisien* mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga tersebut dihipotesiskan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor badan pengelolaan keuangan asset daerah (BPKAD), yang berada di kota merauke. Pada penelitian ini *sampling* yang digunakan yaitu menggunakan total *sampling*. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Ringkasan Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner**

Kuesioner	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang dibagi	50	50%
Kuesioner yang tidak kembali	13	13%
Kuesioner yang tidak diolah	2	2%
Kuesioner yang dapat diolah	35	35%

**Tabel 2 Hasil Pengujian Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,930	4,968		2,200	,036

Kualitas sumber daya manusia (X1)	-0,083	,243	-0,074	-,340	,736
Pemanfaatan teknologi informasi (X2)	-0,074	,295	-0,058	-,252	,803
Sistem pengendalian intern(X3)	,166	,235	,134	,706	,486
Pengawasan keuangan daerah (X4)	,382	,191	,348	2,005	,054

Pada penelitian ini uji t digunakan agar dapat melihat adanya pengaruh variabel bebas dengan parsial pada variabel terikat. Pada uji t digunakan dengan berdasarkan kepada nilai *probabilitas*. Apabila nilai sig. < 0,05 (5%) artinya hipotesis yang diajukan dikatakan tidak sig atau ditolak (Ghozali, 2014)

Berdasarkan pengujian hipotesis pada SPSS ver. 25, maka nilai uji t ialah :

- Nilai sig. Pada Kualitas SDM terhadap Nilai Informasi sebesar  $0,736 > 0,05$  maka hipotesis 1 ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh X1 terhadap Y
- Nilai sig. Pada Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Nilai Informasi sebesar  $0,803 > 0,05$  yang artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y
- Nilai sig. Pada Sistem pengendalian intern terhadap Nilai Informasi sebesar  $0,486 > 0,05$  berarti tidak ada pengaruh X3 terhadap Y
- Nilai sig. Pada Pengawasan keuangan daerah terhadap Nilai Informasi sebesar  $0,054 > 0,05$  yang artinya X4 tidak ada pengaruh dan signifikan

## Pembahasan

### 1) Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi terkait Pentingnya Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ini diperoleh koefisien regresi sebesar -0,083 dengan tingkat signifikan  $0,736 > 0,05$  dengan nilai t hitung sebesar -0,340, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 ditolak atau kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai informasi pentingnya laporan keuangan. Artinya bahwa nilai informasi terkait pentingnya laporan keuangan tidak tergantung pada kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menjalankan fungsi pemerintahan tetapi bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan, walaupun sumber daya manusia itu sendiri yang membuat laporan keuangannya, karena pada era sekarang ini telah banyak perkembangan sebagai aplikasi yang dibuat pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan yang akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga walaupun pegawai tersebut mempunyai pendidikan akuntansi ataupun tidak akan dapat membuat laporan keuangan dengan cara mengikutsertakan dalam kursus atau pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan.

Keikutsertaan dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terutama pada bagian keuangan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan sangat diperlukan sebab dengan adanya kerja sama dan dukungan berbagai pihak seperti motivasi dan data yang lengkap akan mengurangi resiko kesalahan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan seperti, kesalahan pada pencatatan serta dalam memasukkan data keuangan sehingga laporan keuangan yang dibuat

dapat dikatakan berkualitas, kerja sama yang baik akan memberikan keharmonisan dalam bekerja akan merasa nyaman dan dapat membuat laporan keuangan dengan baik.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bawah kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap nilai informasi laporan keuangan maka hipotesis pertama ditolak hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Indriasari (2008) Arfianti (2011) bawah kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

## **2) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)**

Hasil uji hipotesis kedua nilai signifikansi sebesar  $0,803 > 0,05$ , yang artinya pemanfaatan teknologi informasi mempunyai tidak pengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan menggunakan teknologi mampu mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan komunikasi dan pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, dan keakurasian dalam perhitungan. Dengan adanya kemajuan teknologi serta memafaatkan sarana-sarana yang ada seperti komputer, jaringan dan lainnya harus diimbangi juga dengan sumber daya manusia sebagai orang yang menggunakan teknologi tersebut harus mempunyai keahlian dalam menjalankan teknologi itu sendiri agar data yang diolah didalam teknologi itu menjadi lebih optimal, serta dapat mengurangi resiko-resiko kesalahan yang mungkin akan terjadi ketika orang tersebut tidak ahli dalam menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan dawanis (2012), Indriasari (2008), dan Winidyaningrum (2010) serta mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan mamfaatandari suatu teknologi informasi.

## **3) Sistem Pengendalian Intern (X3) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)**

Hasil uji ketiga nilai signifikan sebesar  $0,486 > 0,05$  maka hipotesis ketiga ditolak yang artinya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pengendalian akuntansi adalah perencanaan organisasi dan reliabilitas laporan keuangan (Armando, 2016). Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, karena dengan adanya pengendalian atau pengawasan itu sendiri laporan keuangan yang di buat bebas dari penyimpangan dan telah sesuai dengan standar yang telah dibuat pemerintah, serta bilah ditemukan penyimpangan dapat cepat diambil sebuah tindakan.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan jaminan atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakpaksahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Dengan adanya pengendalian diharapkan aparat pemerintah menggunakan

sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis kepada masyarakat, bebas dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2012), dan Naharto (2012), bawah pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4) Pengawasan Keuangan Daerah (X4) Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y).**

Hasil uji keempat nilai signifikan sebesar  $0,054 > 0,05$  maka hipotesis keempat ditolak yang artinya pengawasan laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pengawasan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan akan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan keuangan daerah yang baik diperlukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah akan mempermudah pemakaian pengawasan keuangan dalam mengelola data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diterapkan pada pengawasan keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik, membantu dalam pembuatan laporan keuangan itu sendiri mulai dari awal terjadinya transaksi atau awal data itu akan diolah kemudian data itu diproses sampai akhirnya data itu menjadi laporan keuangan yang telah sesuai dengan sistem yang telah dibuat, sehingga hasil laporan keuangan yang dibuat menjadi baik dan berkualitas. Dengan adanya sebuah pengawasan keuangan daerah berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurillah (2014), dan Anisma (2012), pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, karena dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang mencakup dalam pembuatan sampai pelaporan, akan penciptakan pengelolaan keuangan yang stransparan dan akuntabel.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Pengendalian intern , dan Pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai informasi prlaporan keuangan.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, Wiwik, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol. 5 No. 1 Juni, 2010
- Armando Gerry, Pengaruh Sistem Pendendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi), Skripsi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2012. Makassar, 2012
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntantansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal. 2011.
- Mardiasmo, Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia Vol. 6 No.1, Juni 212.
- Sukmaningrum, Tantriani. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang), Skripsi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika, Universitas Diponegoro, 2012.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati, Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN). Simposium Nasional Akuntansi XIII, ASP, Purwokerto, 2010.
- Yudianto, I Gede Agus dan Ni Made Adi Erawati, Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal FE Unud, 2012.
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang).Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ariesta Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi. Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Vol 1, No 1 Tahun 2013.
- Celviana, Winidyaningrum, dan Rachmawati. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Darwanis dan Desi Dwi Mahyani. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 2. No. 2 Juli 2009 Hal. 133-151.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Dengan Program IBM SPSS 19.Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita Silvia Marda. 2010. tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai.

- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 4 no.4 Desember 2012.
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali.
- Mahmudi. 2018. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN
- Mulyadi, 2016, Sistem Akuntansi, Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2016. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Ghozali, Imam 2016. Analisis faktor- yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan ( Studi Empiris pada SKPD Riau) .
- Nurillah 2014 Pengaruh kopetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sitem pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Studi empiris SKPD kota depak.
- Anisma Kendi dan rahayu 2014. Pengaru kapasitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfatan teknologi informasi, laporan keuangan 1.No.2.Oktober 2014